



LAPORAN

Kinerja

TW I TAHUN 2026

STASIUN PPMHKP BANDUNG
Tahun 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDUNG

JALAN CIAWITALI NO. 44 CIMAHI

TELEPON (022) 6649004

LAMAM www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.bandung@kkp.go.id

Yth. Kepala BPPMHKP
Cq. Ketua Tim Kerja Pelaporan Kinerja
Sekretariat BPPMHKP
di Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor: B.428/SPPMHKP.BDG/KP.732/IV/2026

NO	NASKAH DINAS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Bersama ini kami sampaikan: Dokumen Laporan Kinerja SPPMHKP Bandung Triwulan I Tahun 2026	1 (Satu) Dokumen	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan laporan

Penerima
Nama Jabatan,

Cimahi, 23 April 2026
Pengirim
Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Bandung



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

(.....)

Isep Wahyudin

Diterima tanggal, ... April 2026
No.HP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Bandung Triwulan Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan Stasiun PPMHKP Bandung selama Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja Stasiun PPMHKP Bandung Triwulan I Tahun 2026.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2026 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Cimahi, 23 April 2026

Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Bandung,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Isep Wahyudin

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
EKSEKUTIF SUMMARY	IV
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis	4
1.4 Sistematika Penyajian.....	5
II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Sasaran.....	7
2.2 Indikator dan Target Kinerja.....	8
2.3 Pengukuran Kinerja.....	9
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja.....	10
3.2 Analisis dan Evaluasi.....	12
3.3 Realisasi Anggaran.....	35
IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	36
4.2 Rekomendasi.....	36
4.3 Tindak lanjut Rekomendasi.....	36
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SPPMHKP Bandung TA 2026	8
Tabel 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja SPPMHKP Bandung TW I Tahun 2026	10
Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 TW I Tahun 2026	15
Tabel 4. Target dan Realisasi IK2 TW I Tahun 2026	18
Tabel 5. Target dan Realisasi IK3 TW I Tahun 2026	19
Tabel 6. Target dan Realisasi IK4 TW I Tahun 2026	20
Tabel 7. Target dan Realisasi IK5 TW I Tahun 2026	26
Tabel 8. Target dan Realisasi IK6 TW I Tahun 2026	27
Tabel 9. Target dan Realisasi IK7 TW I Tahun 2026	28
Tabel 10. Target dan Realisasi IK8 TW I tahun 2026	29
Tabel 11. Target dan Realisasi IK9 TW I tahun 2026	30
Tabel 12. Target dan Realisasi IK10 TW I tahun 2026	31
Tabel 13. Target dan Realisasi IK11 TW I tahun 2026	32
Tabel 14. Target dan Realisasi IK12TW I tahun 2026	35
Tabel 15. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan I Tahun 2026	35
Tabel 16. Penyerapan Anggaran per Jenis Akun Triwulan I Tahun 2026	35

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Bandung selama Triwulan I Tahun 2026. Capaian kinerja (performance results) SPPMHKP Bandung Triwulan I tahun 2026 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2026 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Stasiun PPMHKP Bandung telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan selama Periode Triwulan I Tahun 2026.

Stasiun PPMHKP Bandung telah menetapkan target kinerja Tahun 2026 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Bandung dengan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Stasiun PPMHKP Bandung terdiri dari 3 Sasaran Strategis (SS) dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan.

Secara umum, Stasiun PPMHKP Bandung telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan selama periode Triwulan I Tahun 2026. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Stasiun PPMHKP Bandung pada Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1 yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SPPMHKP Bandung, target 72 % dan realisasi 76,55%, capaiannya 106,32 %;
- b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SPPMHKP Bandung, target 72 % dan realisasi 80,38%, capaiannya 111,64 %;

2. Sasaran Strategis 3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Bandung.

Capaian IKU untuk SS ini adalah sebagai berikut :

- a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung dari target 86%, realisasi 100% sehingga persentase capaian nilai kinerja sebesar 116,28%;
- b. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung dari target 77%, realisasi 100%, sehingga persentase capaian nilai kinerja sebesar 110%;
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun PPMHKP Bandung, target 3,50 dan realisasinya 3,82, capaiannya 109,14.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Stasiun PPMHKP Bandung Triwulan I Tahun 2026 dengan sasaran strategis sebanyak 3 sasaran Strategis dan 12 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana akan diupayakan untuk dapat dilaksanakan sesuai target.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Stasiun PPMHKP Bandung dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Stasiun PPMHKP Bandung pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Stasiun PPMHKP Bandung dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan bahwa Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Bandung merupakan kepanjangan tangan dari BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SPPMHKP Bandung dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SPPMHKP Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun PPMHKP Bandung. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

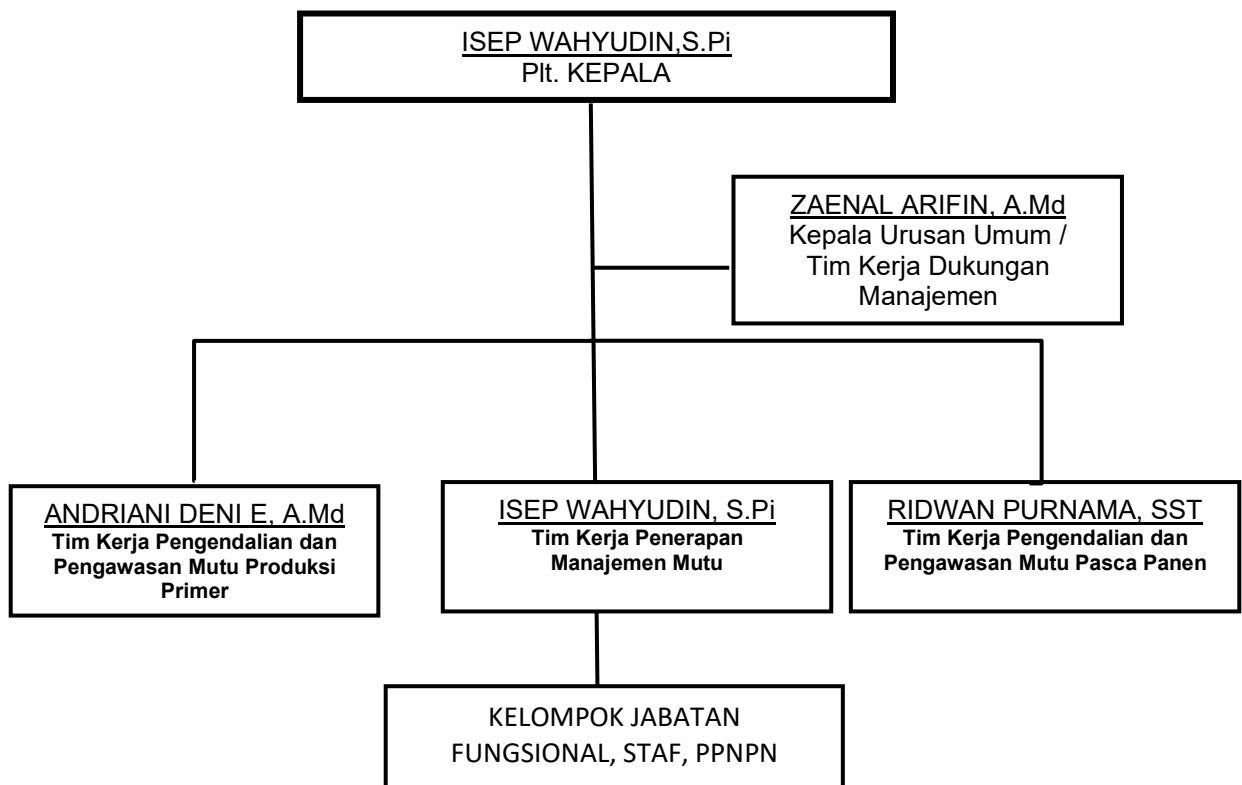
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Bandung mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PPMHKP Bandung menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; b) pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan; c) pelaksanaan surveilans, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilans, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan; d) pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan; e) pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan; f) pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi; g) pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu

dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; h) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; i) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan; j) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP, saat ini Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum, 2 orang Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, 1 orang Asisten Inspektur Mutu Penyelia, 1 orang Asisten Inspektur Mutu Pelaksana, 1 Orang Pranata Pengelola Keuangan APBN Mahir, 1 Orang Penatalaksana Barang Terampil, 3 orang staf pelaksana, dan 7 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) .

Struktur organisasi SPPMHKP Bandung dapat dilihat dalam Gambar 1



Gambar 1 **Struktur Organisasi SPPMHKP Bandung**

1.3 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun PPMHKP Bandung disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun PPMHKP Bandung adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan

- Penguatan pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan
- Meningkatkan standar mutu dan keamanan hasil perikanan agar sesuai dengan persyaratan nasional dan internasional, mendukung daya saing produk perikanan di pasar global.
- Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan
- Menerapkan teknologi dan sistem pengawasan yang terintegrasi untuk menjamin mutu, keamanan, dan kelestarian hasil perikanan.
- Peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur pengujian mutu perikanan
- Memperkuat kompetensi sumber daya manusia dan fasilitas laboratorium guna mendukung pengujian, inspeksi, dan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Penerapan inovasi teknologi dalam pengolahan dan pengujian hasil perikanan
- Mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengujian mutu hasil perikanan serta pengolahan produk.
- Penguatan kerjasama lintas sektor dan internasional
- Memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait, dunia usaha, serta organisasi internasional untuk memperkuat sistem mutu hasil perikanan.

2. Isu Strategis

- Tantangan globalisasi dan perdagangan internasional

- Penyesuaian standar mutu dan keamanan produk perikanan sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional (SPS/WTO).
- Pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka ekspor
- Menghadapi persyaratan ketat negara tujuan ekspor yang menuntut standar mutu dan keamanan tinggi.
- Perubahan iklim dan dampaknya terhadap kualitas hasil perikanan
- Mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan laut yang mempengaruhi mutu dan ketersediaan hasil perikanan.
- Peningkatan kapasitas laboratorium dan SDM pengujian mutu
- Kebutuhan peningkatan mutu layanan laboratorium dan pengujian yang mampu mendukung pengelolaan mutu hasil perikanan.
- Pengendalian risiko keamanan pangan hasil perikanan
- Mencegah dan mengatasi kontaminasi bahan berbahaya seperti logam berat, residu pestisida, dan mikroba patogen.
- Pengembangan sistem traceability produk perikanan
- Menjamin keterlacakan produk hasil perikanan dari sumber sampai ke konsumen.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Stasiun PPMHKP Bandung Triwulan I Tahun 2026 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

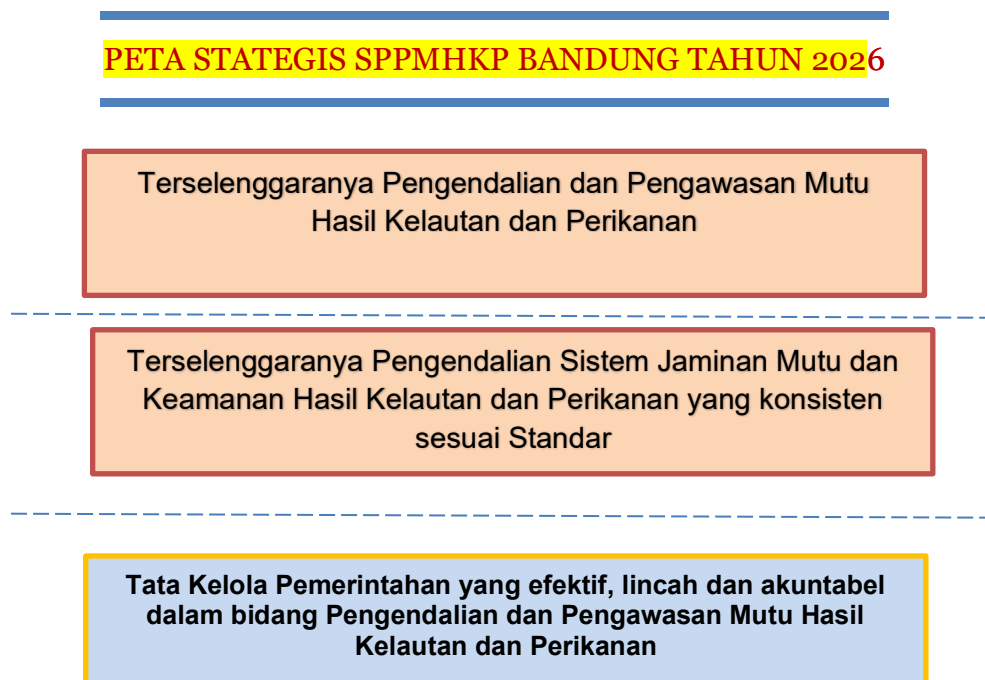
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

2.1 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun PPMHKP Bandung tahun 2026 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.



Gambar 2 Peta Strategi Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2026

2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Pada Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Bandung mempunyai indikator sebanyak 12 Indikator, sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja SPPMHKP Bandung Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai Standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Bandung	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Indeks)	3.5

2.3 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi *Maximize*
Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:
$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$
 - b. Polarisasi *Minimize*
Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:
$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target}))\} \times 100\%$$
 - c. Polarisasi *Stabilize*
Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

	$100 \leq X \leq 120$ (memenuhi ekspektasi)
	$80 \leq X \leq 100$ (belum memenuhi ekspektasi)
	$X \leq 100$ (Tidak memenuhi ekspektasi)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun PPMHKP Bandung pada Triwulan I Tahun 2026 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,06 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK

Rekapitulasi capaian kinerja Stasiun PPMHKP Bandung pada Triwulan I Tahun 2026 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Triwulan I tahun 2026		
				Target	Realisasi	%
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	72	76,55	106,32
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi	72	80,38	111,64

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Triwulan I tahun 2026		
				Target	Realisasi	%
			Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)			
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	-	-	-
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai Standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	-	-	-
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Bandung	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Indeks)	-	-	-
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	-	-	-
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	-	-	-
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Persen)	86	100	116,28
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	-	-	-
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	-	-	-
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	77	100	120
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Indeks)	3,5	3,82	109,14

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Kegiatan Pengendalian Mutu

Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Bandung pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.

Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Stasiun PPMHKP Bandung. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan (Kegiatan Pengendalian Mutu) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bandung.

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilan, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pengawasan Mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans.

Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah ukuran pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Pada Triwulan I Tahun 2026, indikator ini mempunyai target 72 %, dan realisasinya sebesar 76,55%, dan pada Triwulan I tahun 2026 Badan Mutu KKP Bandung hanya melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu :

- Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Adapun data terkait dengan sertifikasi produksi primer yang telah terbit yaitu :

CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik)

NO	PERUSAHAAN	NO REF TEKNIS	JENIS OBAT	TANGGAL TERBIT	KATEGORI
1	Medion Farma Jaya				

CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)

NO	PELAKU USAHA	NO REF TEKNIS	KOMODITAS	TANGGAL TERBIT	GRADE
1	Koperasi Produsen BMMC	ID-CBIB-T-32-260005	Nila	9 Feb 2026	B
2	Agus Mulyana	ID-CBIB-T-32-260014	Lele	15 Feb 2026	B
3	Asep Sukmana	ID-CBIB-T-32-260015	Lele	15 Feb 2026	B

4	Cecep Lukmanul Hakim	ID-CBIB-T-32-260016	Nila	15 Feb 2026	B
5	Dadang Sutisna	ID-CBIB-T-32-260017	Nila	15 Feb 2026	B
6	Andy Muklis Prasetyana	ID-CBIB-T-32-260018	Lele	15 Feb 2026	B
7	Rahmat Hidayat	ID-CBIB-T-32-260019	Nila	15 Feb 2026	B

CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)

NO	PERUSAHAAN/PELAKU USAHA	NO REF TEKNIS	KOMODITAS	TANGGAL TERBIT	GRADE
1	UPTD Balai Benih Ikan Cimaja	ID-CPIB-T-32-260003	Benih Ikan Lele	06/02/2026	SANGAT BAIK
		ID-CPIB-T-32-260004	Benih Ikan Nila	06/02/2026	SANGAT BAIK

Cara pengukurannya adalah dengan menjumlahkan Tingkat Efektivitas pengendalian dan pengawasan pada masing-masing unit yang menerapkan CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB/CDOIB dan CPIB Kapal dibagi dengan jumlah unsur pembentuk :

$$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn}$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup **UPT....**

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Pengukuran Tingkat efektivitas untuk saat ini di hitung oleh Pusat Mutu Produksi Primer, dan berdasarkan Surat Nomor B.299/BPPMHKP.3/RC.610/IV/2026 tanggal 15 April 2026, maka hasil penilaian Stasiun PPMHKP Bandung adalah 76,55 dengan uraiannya sebagai berikut :

1. TE CBIB = 84,44 %

2. TE CPIB = 85 %

3. TE CPOIB CDOIB = 83,33%

4. TE CPPIB = 65 %

5. TE CPIB Kapal = 65 %

Apabila dibandingkan dengan capaian Trwulan I tahun 2025, maka pada tahun 2026 mengalami penurunan, namun penurunan tersebut disebabkan oleh bedanya cara perhitungan dalam menentukan presentase indicator tersebut.

Adapun kegiatan yang mendukung indicator ini adalah :

- Validasi sertifikasi produksi primer
- Insfeksi ke Lokasi usaha

Permasalahan utama dalam indicator ini adalah dengan diberlakukannya efesiensi anggaran menghambat terhadap pelaksanaan inspeksi ke Lokasi usaha.

Tabel 3 Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan I					TW I Tahun 2026			Tahun 2026		Renstra2020-2024	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen	Target	Persen
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung	-	-	-	-	-	72	76,55	106,32	72	106,32	72	106,32

IK2. Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bandung

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan

perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku, dan Standar Internasional (Codex Alimentarius);

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Perhitungan indikator ini yaitu :

$$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar

mutu dan keamanan pangan lingkup UPT ...

- A = Tingkat Efektivitas Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk yang menerapkan manajemen keamanan diatas standar
 - B = Tingkat Efektivitas SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP diatas standar
 - C = Tingkat Efektivitas surat keterangan penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit distribusi ikan dan/atau supplier
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Pada Triwulan I 2026 indikator ini ditargetkan 72 % dan berdasarkan Surat Nomor B.450/BPPMHKP.4/RC.610/IV/2026 tanggal 16 April 2026, Stasiun PPMHKP Bandung mendapatkan presentase sebesar 80,38%. Hal ini terlihat dari capaian Tingkat Efektivitas sertifikasi produk HACCP dari target 87,24 %, sedangkan untuk Tingkat Efektivitas SKP yaitu 78,90 % dan untuk Tingkat Efektivitas SPDI sebesar 75%. Perhitungan efektivitasnya dilakukan oleh Pusat Mutu Pasca Panen.

Apabila dibandingkan dengan target dan capaian triwulan I Tahun 2025, maka pada tahun 2026 ini mengalami peningkatan, Dimana pada tahun 2025 target hanya 70% dan capaian 75%.

Kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu Inspeksi dan Surveilans Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP dan validasi pengajuan SKP.

Selain hal tersebut, capaian 80,38 % ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan inspeksi penerapan HACCP hanya dilakukan oleh 2 orang fungsional Inspektur mutu dan 2 orang asisten inspektur mutu, dan 1 orang penata Kelola kelautan dan perikanan yang telah ber noreg atau sebesar 25 % dari total pegawai Stasiun PPMHKP Bandung sebanyak 20 orang.

Selain dari sisi efisiensi SDM, capaian ini juga tidak lepas efisiensi teknologi yang digunakan, yaitu sistem informasi berupa platform aplikasi honest (HACCP Online System) yang dikelola oleh BPPMHKP bersama dengan PUSDATIN-KKP pada link <http://haccp.bkipm.kkp.go.id/h3/login/>. Sistem ini telah digunakan sejak tahun 2007 dan saat ini telah digunakan hampir disemua kantor pelayanan BPPMHKP di seluruh Indonesia. Pelayanan dengan aplikasi honest selain mempermudah layanan juga akan merekam semua kegiatan Tindakan yang dilakukan dalam

proses sertifikasi mutu untuk kegiatan ekspor, impor dan domestik serta informasi kegiatan monitoring dan surveilen.

Namun untuk Indikator ini terkendala dari aspek anggaran, yang mana anggaran yang dipakai merupakan anggaran bersumber PNPB dan terkena blokir, sehingga untuk pelaksanaan triwulan I ini sangat terbatas.

Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Triwulan I					TW I 2026			2026		Renstra2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	%	Target	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bandung	-	-	-	-	75	72	80,38	111,64	72	111,64	72	111,64

IK3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.

Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di kab/kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan

baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya

Indikator ini merupakan indikator baru pada akhir tahun 2026 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun sebelumnya. Pada tahun 2026 indikator ini ditarget sebesar 71 % dan belum terealisasi karena perhitungannya dilakukan per semester.

Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Triwulan I					Triwulan I Tahun 2026			2026		Renstra 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung	-	-	-	-	-	71	-	-	71	-	71	-

Sasaran Strategi 2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

IK4. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung

Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional.

Nilai kualitas penerapan Quality Managemen System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan

menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup; 2. Acuan Normatif; 3. Persyaratan Umum; 4. Persyaratan Struktural; 5. Persyaratan Sumber Daya; 6. Persyaratan Proses; 7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi: 1. Persyaratan Umum, 2. Persyaratan Struktural, 3. Persyaratan Sumberdaya, 4. Persyaratan Proses, 5. Persyaratan Sistem Manajemen

Perhitungannya adalah :

$$X = \frac{A+B+C}{3} \times 100\%$$

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bandung

A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020

B = Presentase Penerapan ISO 17025

C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS)

Pada tahun 2026 Indikator ini ditarget sebesar 71 %, dan dilakukan perhitungan secara per triwulan, namun karena pada TW I ini Stasiun PPMHKP Bandung bukan termasuk yang dinilai maka pada TW I ini target dan Realisasinya Tidak ada.

Tabel 6. Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Triwulan I					Triwulan I Tahun 2026			2026		Renstra2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung	-	-	-	-	-	71	-	-	71	-	71	-

Kegiatan Dukungan Manajemen

Capaian kinerja Stasiun PPMHKP Bandung pada Kegiatan Dukungan Manajemen berasal dari satu sasaran strategis, yakni Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Strategi 3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK5. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- a. Kualifikasi;
- b. Kompetensi;

- c. Kinerja; dan
- d. Disiplin.
- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, maka terdapat beberapa penyesuaian dari dimensi Kualifikasi sebagai berikut:

1. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
2. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN.

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat ke dalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Penyesuaian Kompetensi sebagai berikut:

- 1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20

JP akan dinilai secara proporsional;

- 2) Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;
- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d ke bawah	1

Penyesuaian dimensi Kinerja sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

• Nilai	• Nama Hukuman Disiplin	• Nilai Disiplin
• 0	• Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	• 5
• R	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	• 3
• S	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	• 2
• B	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	• 1

Penyesuaian dimensi Disiplin yaitu: Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir, bukan 5 tahun lagi.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi e-Pegawai Online KKP.
- b. **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

- c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;
 - d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.
- b. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

- Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Pada Tahun 2026 Indikator ini mempunyai target 82,50 dan pada periode triwulan I tahun 2026, indikator ini belum mempunyai target dan realisasi karena perhitungannya dilakukan per Semester.

Tabel 7. Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja		TW I					TW I Tahun 2026			2026		Renstra2025-2029	
		2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Indeks ASN	Profesionalitas	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	87	-

IK6. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

1. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
2. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
3. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
4. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
5. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
6. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada tahun 2026 Indikator ini mempunyai target nilai sebesar 77, dan pada Triwulan I ini, tidak mempunyai target dan realisasi karena perhitungannya dilakukan tahunan.

Tabel 8. Target dan Realisasi IKU 6 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	TW I					TW I Tahun 2026			2026		Renstra2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	77	-

IK7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM Bandung dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan

kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%).

FORMULASI PERHITUNGAN

- Nilai PM SAKIP (**Unit Kerja Level 2**) adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri **Sekretariat Es.1**
- atas implementasi SAKIP di (**Unit Kerja Level 2**)
- Kategori nilai PM SAKIP (**Unit Kerja Level 2**) yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Pada Tahun 2026 Indikator ini ditargetkan nilai sebesar 86,20, namun oada triwulan I ini tidak punya target dan capaian, karena perhitungannya dilakukan tahunan.

Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Tahun 2026			2026		Renstra2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IK8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem

pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Pada Tahun 2026 indikator ini ditargetkan sebesar 86 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukan bahwa STASIUN PPMHKP bandung pada Triwulan I Tahun 2026 telah menuntaskan 100 % perbaikan atau sebesar 116,28 Apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 dan 2024 indikator telah menuntaskan sama sama 100 % perbaikan.

Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Triwulan I					Triwulan I Tahun 2026			2026		Renstra2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	80	80	100	100	100	86	100	116,28	86	116,28	86	116,28

IK9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Perhitungannya dengan menggunakan rumus :

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Pada Tahun 2026 indikator ini ditargetkan sebesar 92,10, namun pada triwulan I tahun 2026 belum ada target dan capaian, karena perhitungannya dilakukan per semester.

Tabel 11 Target dan Realisasi IK9 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	TW I Tahun					TW I Tahun 2026			2026		Renstra2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Nilai IKPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IK10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

NKPA level 1 didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

$$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$$

Keterangan:

NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I
 CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
 NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker
 NESatker : Nilai Efisiensi Satker
 WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
 WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker
 WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektifitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Pada Tahun 2026, indikator ini mempunyai target 71,75 yang dihitung secara tahunan, sehingga pada triwulan I tahun 2026 ini belum mempunyai target dan capaian.

Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	TW I Tahun					TW I Tahun 2026			2026		Renstra2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IK11. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat

merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Perhitungannya dilakukan oleh Biro PBJ dengan menggunakan rumus :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$

Pagu Pengadaan Barang/Jasa

Pada tahun 2026, indikator ini mempunyai target sebesar 77, dan perhitungannya dilakukan per triwulan. Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 283/SJ.7/PL.410/IV/2026 perihal penyampaian hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP TW I Tahun 2026, maka Stasiun PPMHKP Bandung telah menyelesaikan 100%. Indikator ini adalah Indikator baru pada tahun 2026 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	TW I Tahun					TW I Tahun 2026			2026		Renstra 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung	-	-	-	-	-	77	100	120	77	120	77	120

IK12. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bandung sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP

Indikator ini pada Tahun 2026 mempunyai target indeks sebesar 3,50 dan berdasarkan Memorandum dari Sekretariat BPPMHKP Nomor 1066/BPPMHKP.1/HM.450/I/2026 tanggal 10 April 2026, Stasiun PPMHKP Bandung menempati urutan ke 25 dari 47 UPT dengan Indeks 3,82 dan nilai SKM sebesar 95,61. Apabila dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 yang dapat dibandingkan hanya nilai SKM yaitu 94,94 mengalami peningkatan.

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan proses Survei Kepuasan Masyarakat kepada pada pengguna jasa,
- Mengolah hasil Survey
- Menyajikan serta melaporkan hasil SKM.
- Mensosialisasikan nilai SKM kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media social maupun papan iklan

Tabel 14. Target dan Realisasi IK12 pada TW I Tahun 2026

Indikator Kinerja	TW I					TW I 2026			2026		Renstra2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Tar	%	Tar	%
Indeks Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun PPMHKP Bandung	-	88,89	90,56	3,82	94,94	3,50	3,82	109,14	3,50	109,14	3,50	109,14

3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP Bandung pada tahun anggaran (T.A) 2026 adalah sebesar Rp. 4.278.084.000, namun dikarenakan pada tahun 2026 ini ada efesiensi anggaran maka pagu terakhir setelah revisi menjadi Rp. 3.963.149.000, dan pada triwulan I pada tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp. 696.568.956 atau sebesar 17,58 % Realisasi penyerapan anggaran SPPMHKP Bandung TW I T.A 2026 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 15 dan Tabel 16.

Tabel 20. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

No	KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RAELISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	7010	Manajemen Mutu	56.500.000	-	-
2	3989	Pengendalian Mutu	145.370.000	8.609.000	5,92
4	3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	3.761.279.000	687.959.956	18,29
		TOTAL	3.963.149.000	696.568.956	17,58

Tabel 21. Penyerapan Anggaran per Jenis Akun Triwulan I Tahun 2026

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	2.987.261.000	424.785.277	14,22
2	Belanja Barang	975.888.000	271.783.679	27,85
3	Belanja Modal	-	-	
	TOTAL	3.963.149.000	696.568.956	17,58

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Bandung Triwulan I Tahun 2026 menyajikan keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran kinerja Stasiun PPMHKP Bandung pada Triwulan I Tahun 2026, yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama. Capaian kinerja Stasiun PPMHKP Bandung pada Triwulan I Tahun 2026 sudah ***ISTIMEWA***, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan I sebesar 112,06, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Dari 12 Indikator Kinerja terdapat 5 (41,67%) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan terdapat 7 (58,34%) Indikator Kinerja yang belum mempunyai target dan realisasi.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun PPMHKP Bandung pada Triwulan I tahun 2026, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.

4.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA

Tindak Lanjut berdasarkan Rekomendasi Tahun 2025, yaitu :

- Telah dilakukan koordinasi semua penanggung jawaan IKU untu meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN PPMHKP BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama IKU 1	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2026	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	72	72	72	72	72	72	72		72
Realisasi	76,55	0	0	0	0	0	0	0	
% Capaian	106,32	0	0	0					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- Badan Mutu KKP Bandung saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :
 - Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
 - Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
 - Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
 - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
- Pada Triwulan I tahun 2026 Badan Mutu KKP Bandung hanya melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu :
 - Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 - Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

- Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) pada 7 lokasi atau pelaku usaha yaitu
 - Asep Sukmana(Lele) (Bandung)
 - Andy Muklis Prasetyana (Lele) (Bandung)
 - Agus Mulyana (Lele) (Bandung)
 - Rahmat HidayatI (Nila) (Bandung)
 - Koperasi Produsen Bukti Makmur Mandiri Cisolok (Nila) (Sukabumi)
 - Dadang Sutisna (Nila) Bandung
 - Cecep Lukmanulhakim (Nila) (Bandung)
- Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu
- Serifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu UPTD Balai Benih Ikan Cimaja, namun dua sertifikat yaitu (Pembenihan Ikan Lele dan Ikan Nila)
- Capaian iku ini diperoleh dari hasil Tingkat efektivitas dari sertifikat primer yang dilakukan oleh pusat Mutu produksi Primer, sehingga untuk capaiannya menunggu hasil dari puisat:

- Output dari kegiatan ini terdiri dari :
 - 2 sertifikat CPIB
 - 1 Sertifikat CPOIB
 - 7 Sretifikat CBIB
- Cara Pengukurannya adalah :

$$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn}$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup **UPT....**

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Untuk Triwulan I perhitungan Tingkat Efektivitas dilakukan oleh Pusat Mutu Produksi Primer, sehingga untuk Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bandung hasilnya berdasarkan formula diatas dengan hasil :

1. Tingkat Efektivitas CBIB : 84,44%
2. Tingkat Efektivitas CPIB : 85 %
3. Tingkat Efektivitas CDOIB dan CPIOB : 83,33%
4. Tingkat Efektivitas CPPIB : 65 %
5. Tingkat Efektivitas CPIB Kapal : %

Jadi Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bandung sebesar 76,55

Akar Masalah

Permohonan dari pelaku usaha pada triwulan I menurun dibandingkan pada tahun 2025

Tindakan yang telah dilaksanakan

Akan selalu melakukan sosialisasi kepada dinas dan para penyuluh agar para pelaku usaha dibimbing untuk melakukan permohonan sertifikasi

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Sosialisasi lebih Intensif	Ketua Tim Kerja Mutu Produksi Primer	TW I Tahun 2026

Cimahi, 16 April 2026
Penanggung jawab IKU


Andriani Den Efendi, A.Md

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN PPMHKP BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama IKU 2	:	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2026	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	72	72	72	72	72	72	72		72
Realisasi	80,38	0	0	0	0	0	0	0	
% Capaian	111,64	0	0	0					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu terhadap unit usaha yang telah menerapkan program persyaratan dasar, manajemen keamanan pangan berbasis HACCP, dan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilan, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Pengawasan Mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans.
- Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah ukuran pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.
- Formulasi Perhitungan:

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung

$$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup **UPT ...**

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Perhitungan Tingket Efektivitas dilakukan oleh Pusat Mutu Pasca Panen, maka untuk triwulan I ini, UPT hanya menrima hasil perhitungan dari pusat, dan untuk TW I Badan Mutu Bandung mendapat Tingkat Efektivitas Pengendalain dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dari masing masing penerapan yaitu :

1. HACCP : 87,24 %
2. SKP : 78,90
3. SPDI : 75 %

Maka berdasarkan formulasinya Badan Mutu Banudng pada TW I ini mendapatkan **Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan 80,38%**

Akar Masalah

Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan Inspeksi karena keterbatasan anggaran yang diblokir dan merupakan sumber PNB

Tindakan yang telah dilaksanakan

Akan menerapkan remote inspeksi untuk kegiatan selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Mengoptimalkan pekasanaan inspeksi melalui remote inspeksi	Ketua Tim Kerja Mutu Pasca Panen	TW I Tahun 2026

Cimahi, 16 April 2026
 Penanggung jawab IKU



Ridwan Purnama, SST

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN PPMHKP BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026**

Nama Sasaran Strategis	:	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Bandung
Nama IKU 6	:	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2026	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	86	86	86	86	86	86	86		86
Realisasi	100	0	0	0	0	0	0	0	
% Capaian	116,28	0	0	0					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi

- Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH.
- Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.
- Pada tahun 2026, Indikator ini mempunyai target 86 %, yang dihitung periode triwulan.
- Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa SPPMHKP Bandung pada Triwulan I Tahun 2026 telah menuntaskan 100 % perbaikan. Apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 indikator telah menuntaskan sama sama 100 % perbaikan.
- Formula Perhitungannya berdasarkan Berdasarkan Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari Aplikasi SIDAK / <https://sidak.kkp.go.id/>, dengan perhitungan :

**Jumlah Rekomendasi Itjen Yang telah tuntas ditindaklanjuti
oleh Unit Kerja**

Jumlah Rekomendasi yang diberikan Kepada Unit Kerja

- Progress terakhir berdasarkan BATL Nomor : 3561.10.03/ITJ/PL.420/III/2025, dari 8 rekomendasi yang merupakan temuan pada tahun 2024, Stasiun PPMHKP Bandung telah menuntaskan semua (100%) rekomendasi temuan.

Akar Permasalahan

- Pertanggungjawaban keuangan / belanja tidak sesuai ketentuan
- Kurangnya data dukung pertanggungjawaban

Tindakan yang telah dilakukan

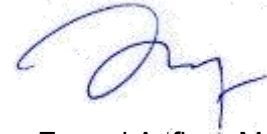
- Melengkapi semua pertanggungjawaban keuangan /belanja sesuai dengan ketentuna

- Melengkapi semua data dukung pertanggungjawaban semaksimal mungkin
- Lebih meningkatkan ketaatan dengan memenuhi semua dokumen yang diminta

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Lebih meningkatkan pengendalian dalam pengujian kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	Q1 Tahun 2026

Cimahi, 13 April 2026

Penanggung
jawab IKU



Zaenal Arifin,A.Md

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN PPMHKP BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026**

Nama Sasaran Strategis	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 12	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2026	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	77	77	77	77	77	77	77		77
Realisasi	100	0	0	0	0	0	0	0	
% Capaian	129,87	0	0	0					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan

Tw4 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian

Q4 Tahunan = Capaian di akhir tahun

2025

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya

- Formula Perhitungan

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%

Pagu Pengadaan Barang/Jasa

- Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
- Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor 283/SJ.7/PL.410/IV/2026, untuk Triwulan I Stasiun PPMHKP Bandung telah terumumkan 100% yang artinya Nilai RUP yang diumumkan pada SIRUP telah sama nilainya dengan pagu pengadaan barang/jasa

Akar Masalah
Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
1. Agar setiap triwulan apabila terdapat Revisi DIPA maka Sirupnya juga harus menyesuaikan	Ketua Tim Kerja Dukungan manajemen	TW I Tahun 2026

Cimahi, 13 April 2025

Penanggung jawab IKU



Zaenal Arifin, A.Md

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026**

Nama Sasaran Strategis	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 12	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2026	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		3,5
Realisasi	3,82	0	0	0	0	0	0	0	
% Capaian	109,14	0	0	0					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.
- Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
- Formulasi Perhitungan

Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unit pelayanan x 25

- Berdasarkan Surat dari Sekretariat BPPMHKP Nomor 1066/BPPMHKP.1/HM.450/IV/2026 tanggal 10 April 2026 Hal Penyampaian Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2026, untuk Stasiun PPMHKP memperoleh IKM 3,82 dan SKM 95,61 dengan peringkat ke 25 dari sebanyak 47 UPT BPPMHKP

Akar Masalah

Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
1.	Ketua Tim Kerja Dukungan manajemen	TW I Tahun 2026

Cimahi, 13 April 2026

Penanggung
jawab IKU


Zaenal Arifin, A.Md



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR
16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP
10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B. 450/BPPMHKP.4/RC.610/IV/2026 16 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka pengukuran dan pelaporan kinerja di lingkungan BPPMHKP periode Triwulan 1 Tahun 2026, bersama ini terlampir disampaikan nilai pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen untuk digunakan sebagai data pengukuran IKU UPT, yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



Ditandatangani
Secara Elektronik

Widya Rusyanto

Tembusan:
Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran

Nomor : B. 450/BPPMHKP.4/RC.610/IV/2026

Tanggal : 16 April 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT BPPMHKP

1. Kepala Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya
2. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I
3. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Pinang
4. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lampung
5. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta
6. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang
7. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya II
8. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong
9. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan
10. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru
11. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan
12. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Denpasar
13. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram
14. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar
15. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado
16. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon
17. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jayapura
18. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banda Aceh
19. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan II
20. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan

- Perikanan Tanjung Balai Asahan
21. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang
 22. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru
 23. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi
 24. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang
 25. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu
 26. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang
 27. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Batam
 28. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak
 29. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung
 30. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Cirebon
 31. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta
 32. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak
 33. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangkaraya
 34. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang
 35. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima
 36. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju
 37. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu
 38. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai
 39. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari
 40. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau
 41. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo
 42. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna
 43. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate

44. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong
45. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Widya Rusyanto

**NILAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PASCAPANEN
TRIWULAN I TAHUN 2026**

No	UPT	Target	TE HACCP	TE SKP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72%	93,20%	86,95%	75,00%	85,05%
2	Balai PPMHKP Ambon	72%	98,34%	90,00%	62,50%	83,61%
3	Balai PPMHKP Balikpapan	72%	91,67%	83,34%	75,00%	83,34%
4	Balai PPMHKP Banjarbaru	72%	97,00%	98,67%	75,00%	90,22%
5	Balai PPMHKP Denpasar	72%	98,89%	96,67%	75,00%	90,19%
6	Balai PPMHKP Entikong	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
7	Balai PPMHKP Jakarta	72%	90,23%	89,38%	91,06%	90,22%
8	Balai PPMHKP Jayapura	72%	70,00%	90,83%	62,50%	74,44%
9	Balai PPMHKP Lampung	72%	98,34%	90,00%	75,00%	87,78%
10	Balai PPMHKP Makassar	72%	93,75%	90,56%	80,00%	88,10%
11	Balai PPMHKP Manado	72%	88,55%	84,92%	75,00%	82,82%
12	Balai PPMHKP Mataram	72%	93,62%	90,65%	75,00%	86,42%
13	Balai PPMHKP Medan I	72%	93,70%	91,06%	75,00%	86,59%
14	Balai PPMHKP Semarang	72%	93,89%	91,53%	75,00%	86,81%
15	Balai PPMHKP Surabaya II	72%	95,42%	89,76%	62,50%	82,56%
16	Balai PPMHKP Tanjungpinang	72%	91,39%	90,27%	75,00%	85,55%
17	Balai PPMHKP Tarakan	72%	93,74%	89,29%	75,00%	86,01%
18	Stasiun PPMHKP Aceh	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
19	Stasiun PPMHKP Bandung	72%	87,24%	78,90%	75,00%	80,38%
20	Stasiun PPMHKP Batam	72%	85,74%	84,62%	62,50%	77,62%
21	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	72%	77,78%	77,78%	62,50%	72,69%
22	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72%	90,89%	70,33%	87,50%	82,91%
23	Stasiun PPMHKP Bima	72%	77,78%	77,78%	62,50%	72,69%
24	Stasiun PPMHKP Cirebon	72%	98,34%	90,00%	87,50%	91,95%
25	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72%	73,89%	76,11%	87,50%	79,17%
26	Stasiun PPMHKP Jambi	72%	68,33%	86,35%	75,00%	76,56%
27	Stasiun PPMHKP Kendari	72%	99,17%	100,00%	62,50%	87,22%
28	Stasiun PPMHKP Kupang	72%	90,88%	89,77%	75,00%	85,22%
29	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72%	77,78%	93,89%	75,00%	82,22%
30	Stasiun PPMHKP Mamuju	72%	66,68%	66,68%	75,00%	69,45%
31	Stasiun PPMHKP Medan II	72%	91,93%	90,14%	75,00%	85,69%
32	Stasiun PPMHKP Merak	72%	73,82%	73,82%	62,50%	70,05%
33	Stasiun PPMHKP Merauke	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
34	Stasiun PPMHKP Padang	72%	54,43%	76,65%	75,00%	68,69%
35	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72%	54,43%	73,87%	75,00%	67,77%

No	UPT	Target	TE HACCP	TE SKP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
36	Stasiun PPMHKP Palembang	72%	77,78%	97,22%	78,97%	84,66%
37	Stasiun PPMHKP Palu	72%	65,56%	81,53%	62,50%	69,86%
38	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72%	97,78%	97,22%	62,50%	85,83%
39	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72%	92,22%	92,78%	62,50%	82,50%
40	Stasiun PPMHKP Pontianak	72%	67,78%	80,00%	62,50%	70,09%
41	Stasiun PPMHKP Sorong	72%	77,78%	90,00%	62,50%	76,76%
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72%	54,43%	54,43%	62,50%	57,12%
43	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72%	100,00%	94,72%	62,50%	85,74%
44	Stasiun PPMHKP Ternate	72%	74,45%	93,89%	75,00%	81,11%
45	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72%	100,00%	77,78%	75,00%	84,26%

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Widya Rusyanto



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor	: 1066/BPPMHKP.1/HM.450/IV/2026	10 April 2026
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026	

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan OP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP).

Target Indeks SKM yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2026 adalah 3,5 sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026 masing-masing OP lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah capaian dari hasil validasi SKM berdasarkan Nota Dinas Nomor 1273/SJ.8/TU.140/IV/2026 perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2026 oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.

1. Indeks SKM yang didapatkan dari seluruh OP BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2026 adalah **3,85** dan mutu pelayanan diperoleh “**A**” kategori “**Sangat Baik**”. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah OP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM dengan kategori sangat baik tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) OP dan kategori baik sebanyak 1 (satu) OP. OP dengan nilai SKM tertinggi diraih oleh Stasiun PPMHKP Gorontalo, Stasiun PPMHKP Palu, dan Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan .

3. Hasil SKM berdasarkan rekap per produk layanan dari 13 (tiga belas) produk layanan terdapat 9 (sembilan) layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 1 (satu) produk layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB). Kemudian, terdapat 3 (tiga) produk layanan yang tidak memiliki responden yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPOIB), Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), dan Sertifikat keikutsertaan dan *final report*.
4. Rekapitulasi per unsur layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur Layanan	Indeks	Nilai SKM
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	3,88	97,01
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	3,86	96,56
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,85	96,15
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	3,86	96,55
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,86	96,49
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	3,79	94,74
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	3,81	95,13
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,87	96,78
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	3,85	96,31

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U7 (Perilaku Pelaksana) dan U3 (Waktu Penyelesaian Pelayanan).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala OP untuk dapat memberikan perhatian lebih pada produk layanan dan unsur layanan yang mempunyai nilai rendah, serta kritik dan saran dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh OP masing-masing.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 1066/BPPMHKP.1/HM.450/IV/2026

Tanggal : 10 April 2026

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP
5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP)
lingkup BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

NO	OP	INDEKS PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Stasiun PPMHKP Gorontalo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	55	Online
2	Stasiun PPMHKP Palu	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	28	Online
3	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	A	Sangat Baik	11	Online
4	Stasiun PPMHKP Merak	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98	3,98	4,00	3,98	3,99	99,81	A	Sangat Baik	43	Online
5	Balai PPMHKP Banjarbaru	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,97	3,99	3,99	3,99	3,99	99,77	A	Sangat Baik	157	Online
6	Stasiun PPMHKP Ternate	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	99,54	A	Sangat Baik	54	Online
7	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	3,99	3,98	3,99	3,97	3,98	3,96	3,98	3,97	3,98	3,98	99,46	A	Sangat Baik	225	Online
8	Stasiun PPMHKP Pangkal Pinang	4,00	3,94	3,97	3,92	3,94	4,00	3,97	3,94	4,00	3,97	99,15	A	Sangat Baik	36	Online
9	Stasiun PPMHKP Sorong	3,98	4,00	3,98	3,95	3,98	3,95	3,93	3,95	3,95	3,96	99,07	A	Sangat Baik	42	Online
10	Balai PPMHKP Mataram	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96	3,95	98,82	A	Sangat Baik	26	Online
11	Stasiun PPMHKP Bengkulu	3,80	4,00	4,00	3,95	4,00	3,90	3,90	4,00	3,95	3,94	98,61	A	Sangat Baik	20	Online
12	Stasiun PPMHKP Bima	4,00	3,88	3,88	3,75	4,00	4,00	4,00	3,88	4,00	3,93	98,26	A	Sangat Baik	8	Online
13	Stasiun PPMHKP Aceh	3,67	4,00	4,00	3,67	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,93	98,15	A	Sangat Baik	3	Online
14	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	3,91	3,70	3,87	3,96	3,96	4,00	4,00	4,00	3,91	3,92	98,07	A	Sangat Baik	23	Online
15	Balai PPMHKP Makassar	3,93	3,92	3,92	3,90	3,93	3,90	3,91	3,92	3,92	3,92	97,96	A	Sangat Baik	368	Online
16	Stasiun PPMHKP Padang	4,00	4,00	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	4,00	3,88	3,92	97,92	A	Sangat Baik	8	Online
17	Balai PPMHKP Balikpapan	3,89	3,88	3,95	3,86	3,91	3,82	3,84	4,00	4,00	3,91	97,66	A	Sangat Baik	57	Online
18	Balai PPMHKP Denpasar	3,92	3,91	3,87	3,90	3,91	3,88	3,90	3,92	3,92	3,90	97,61	A	Sangat Baik	151	Online
19	Stasiun PPMHKP Pontianak	3,96	3,96	3,96	3,98	3,98	3,79	3,77	3,79	3,79	3,89	97,22	A	Sangat Baik	53	Online
20	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	3,93	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,93	3,93	3,93	3,89	97,22	A	Sangat Baik	14	Online
21	Stasiun PPMHKP Cirebon	3,94	3,92	3,92	3,91	3,87	3,85	3,84	3,89	3,86	3,89	97,20	A	Sangat Baik	118	Online
22	Stasiun PPMHKP Merauke	3,91	3,91	3,82	3,82	3,86	3,91	3,82	3,86	3,82	3,86	96,46	A	Sangat Baik	22	Online

23	Balai PPMHKP Ambon	3,88	3,86	3,84	3,79	3,83	3,90	3,86	3,90	3,86	3,86	96,46	A	Sangat Baik	58	Online
24	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	3,88	3,85	3,62	3,90	3,86	3,85	3,85	3,91	3,87	3,84	96,05	A	Sangat Baik	138	Online
25	Stasiun PPMHKP Bandung	3,84	3,79	3,84	3,79	3,84	3,84	3,84	3,79	3,84	3,82	95,61	A	Sangat Baik	19	Online
26	Balai PPMHKP Jakarta	3,86	3,84	3,81	3,88	3,84	3,75	3,79	3,77	3,79	3,81	95,37	A	Sangat Baik	57	Online
27	Balai PPMHKP Tarakan	3,82	3,79	3,85	3,85	3,80	3,77	3,79	3,80	3,77	3,81	95,13	A	Sangat Baik	61	Online
28	Balai PPMHKP Medan I	3,84	3,81	3,84	3,84	3,81	3,81	3,84	3,81	3,63	3,80	95,09	A	Sangat Baik	43	Online
29	Balai PPMHKP Entikong	3,86	3,81	3,81	3,71	3,81	3,78	3,83	3,79	3,83	3,80	95,06	A	Sangat Baik	72	Online
30	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	3,74	3,83	3,83	3,78	3,87	3,78	3,83	3,78	3,78	3,80	95,05	A	Sangat Baik	23	Online
31	Stasiun PPMHKP Medan II	3,87	3,81	3,75	3,85	3,79	3,71	3,75	3,88	3,77	3,80	94,93	A	Sangat Baik	52	Online
32	Balai PPMHKP Jayapura	3,60	4,00	3,80	3,80	4,00	3,60	3,80	3,80	3,60	3,78	94,44	A	Sangat Baik	5	Online
33	Balai PPMHKP Manado	3,73	3,77	3,77	3,77	3,73	3,73	3,77	3,77	3,82	3,76	94,07	A	Sangat Baik	22	Online
34	Balai PPMHKP Surabaya II	3,96	3,95	3,95	3,96	3,92	3,01	3,03	3,93	3,94	3,74	93,51	A	Sangat Baik	104	Online
35	Stasiun PPMHKP Palembang	3,83	3,76	3,72	3,76	3,76	3,55	3,72	3,86	3,69	3,74	93,49	A	Sangat Baik	29	Online
36	Stasiun PPMHKP Kupang	3,74	3,75	3,74	3,71	3,73	3,71	3,71	3,75	3,73	3,73	93,21	A	Sangat Baik	139	Online
37	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	3,62	3,81	3,76	3,71	3,67	3,81	3,71	3,71	3,62	3,71	92,86	A	Sangat Baik	21	Online
38	Stasiun PPMHKP Mamuju	3,77	3,69	3,69	3,69	3,69	3,77	3,62	3,77	3,69	3,71	92,74	A	Sangat Baik	13	Online
39	Stasiun PPMHKP Kendari	3,81	3,75	3,69	3,66	3,78	3,53	3,72	3,69	3,72	3,70	92,62	A	Sangat Baik	32	Online
40	Stasiun PPMHKP Batam	3,69	3,66	3,69	3,86	3,66	3,55	3,59	3,72	3,62	3,67	91,76	A	Sangat Baik	29	Online
41	Balai PPMHKP Semarang	3,67	3,62	3,65	3,67	3,64	3,53	3,58	3,71	3,68	3,64	91,06	A	Sangat Baik	101	Online
42	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	3,67	3,63	3,62	3,69	3,63	3,53	3,59	3,65	3,63	3,63	90,71	A	Sangat Baik	133	Online
43	Stasiun PPMHKP Jambi	3,67	3,67	3,53	3,67	3,47	3,60	3,60	3,67	3,60	3,61	90,19	A	Sangat Baik	15	Online
44	Pusat Manajemen Mutu	3,65	3,55	3,50	3,65	3,55	3,60	3,60	3,60	3,55	3,58	89,58	A	Sangat Baik	20	Online
45	Balai PPMHKP Lampung	3,73	3,65	3,57	3,59	3,54	3,43	3,43	3,68	3,51	3,57	89,26	A	Sangat Baik	37	Online
46	Balai Uji Standar PPMHKP Jakarta	3,68	3,59	3,38	3,59	3,54	3,41	3,51	3,59	3,54	3,54	88,44	A	Sangat Baik	37	Online
47	Stasiun PPMHKP Tahuna	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,11	77,78	B	Baik	1	Online

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Produk Layanan BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	INDEKS PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
1	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	1952	3,92	3,91	3,89	3,92	3,90	3,84	3,86	3,91	3,90	3,90	97,38	A	Sangat Baik
2	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	69	3,86	3,83	3,80	3,81	3,87	3,83	3,87	3,93	3,84	3,85	96,18	A	Sangat Baik
3	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP)	200	3,84	3,82	3,80	3,76	3,81	3,75	3,75	3,83	3,79	3,79	94,75	A	Sangat Baik
4	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	345	3,80	3,77	3,74	3,72	3,74	3,63	3,66	3,77	3,74	3,73	93,24	A	Sangat Baik
5	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	42	3,76	3,76	3,86	3,79	3,79	3,69	3,57	3,81	3,69	3,71	93,65	A	Sangat Baik
6	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	120	3,71	3,68	3,61	3,72	3,73	3,58	3,63	3,68	3,68	3,67	91,69	A	Sangat Baik
7	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	24	3,79	3,71	3,67	3,67	3,58	3,46	3,63	3,67	3,67	3,65	91,20	A	Sangat Baik
8	Sertifikat pengesahan nomor registrasi (<i>approval number</i>)	20	3,65	3,55	3,50	3,65	3,55	3,60	3,60	3,60	3,55	3,58	89,58	A	Sangat Baik
9	Bahan acuan yang disertai dengan <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	4	3,75	3,75	3,50	3,50	3,50	3,25	3,75	3,50	3,50	3,56	88,89	A	Sangat Baik
10	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	7	3,57	3,29	3,29	3,29	3,29	3,14	3,14	3,43	3,14	3,29	82,14	B	Baik
11	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sertifikat keikutsertaan dan <i>final report</i>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seluruh Layanan BPPMHKP		2783	97,01	96,56	96,15	96,55	96,49	94,74	95,13	96,78	96,31	3,85	96,19	A	Sangat Baik

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 7 April 2026

Sehubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP dalam aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Hasil rekapitulasi Capaian IKU Persentase RUP Terumumkan dari 156 (seratus lima puluh enam) Satuan Kerja Pengelola DIPA Aktif sesuai pagu anggaran yang tersedia lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 periode Triwulan 1 sampai dengan waktu *cut off* tanggal 7 April 2025 pukul 22:00 WIB sebesar **99,75%**. (daftar rekapitulasi terampir);

3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkenan untuk melakukan perbaikan/penyesuaian data sesuai ketersediaan anggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1

Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Tanggal : 7 April 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Kode E1	Nama Unit Eselon I	Σ Satker	Persentase RUP Terumumkan					% Target IKU TW 1	Capaian IKU TW - 1 TA. 2026	
				Σ Pagu Pengadaan	Σ Pagu Terumumkan	Σ Selisih Terumumkan	% RUP Terumumkan	Keterangan		% Capaian	Keterangan
1	01	Sekretariat Jenderal	3	470,068,437,000	470,068,437,000	0	100.0000%	Sesuai	85.00	100.00%	Capaian target maksimal
2	13	Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	304,871,258,000	304,871,258,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
3	08	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	1	50,518,334,000	50,518,334,000	0	100.0000%	Sesuai	75.00	100.00%	Capaian target maksimal
4	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	758,474,978,000	758,474,978,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
5	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	42	326,938,554,000	326,938,554,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
6	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	6,234,837,443,000	6,234,837,443,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
7	02	Inspektorat Jenderal	1	15,127,914,000	15,127,743,000	(171,000)	99.9989%	Kurang Terumumkan	77.00	99,99%	Capaian melebihi target
8	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	158,066,570,000	158,069,244,000	2,674,000	100.0017%	Lebih Terumumkan	77.00	99,99%	Capaian melebihi target
9	07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,172,905,904,000	1,166,768,126,000	(6,137,778,000)	99.4767%	Kurang Terumumkan	76.00	99.48%	Capaian melebihi target
10	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	917,960,850,000	897,634,697,000	(20,326,153,000)	97.7857%	Kurang Terumumkan	77.00	97.79%	Capaian melebihi target
TOTAL			156	10,409,770,242,000	10,383,308,814,000	(26,461,428,000)	99.7458%	KURANG TERUMUMKAN		99.75%	CAPAIAN MELEBIH TARGET



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Tanggal : 7 April 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 PER SATUAN KERJA**

 (01) Sekretariat Jenderal – 3 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
	01	SEKRETARIAT JENDERAL	470,068,437,000	470,068,437,000			
1	632004	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14,473,809,000	14,473,809,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622081	BIRO UMUM SETJEN KKP	447,214,323,000	447,214,323,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,380,305,000	8,380,305,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
13		BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	304,871,258,000	304,871,258,000			
1	427598	BALAI BESAR KIPM DAN KHP MAKASSAR	19,484,769,000	19,484,769,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	567610	BALAI KIPM DAN KHP BALIKPAPAN	1,143,921,000	1,143,921,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	649615	BALAI KIPM DAN KHP LAMPUNG	1,029,385,000	1,029,385,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	649750	BALAI KIPM DAN KHP AMBON	1,339,462,000	1,339,462,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	649593	BALAI KIPM DAN KHP BANJARMASIN	1,057,310,000	1,057,310,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000	304,871,258,000			
6	427624	BALAI KIPM DAN KHP DENPASAR	2,030,406,000	2,030,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	649568	BALAI KIPM DAN KHP ENTIKONG	526,628,000	526,628,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	649682	BALAI KIPM DAN KHP JAKARTA II	2,027,441,000	2,027,441,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567812	BALAI KIPM DAN KHP JAYAPURA	942,893,000	942,893,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	567631	BALAI KIPM DAN KHP MANADO	1,141,041,000	1,141,041,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	567758	BALAI KIPM DAN KHP MATARAM	922,433,000	922,433,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	427567	BALAI KIPM DAN KHP MEDAN I	1,053,502,000	1,053,502,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	649661	BALAI KIPM DAN KHP SEMARANG	1,436,067,000	1,436,067,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	427542	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA I	2,120,230,000	2,120,230,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	3,290,509,000	3,290,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	649640	BALAI KIPM DAN KHP TJ. PINANG	388,074,000	388,074,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	649572	BALAI KIPM DAN KHP TARAKAN	872,480,000	872,480,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	662897	BALAI UJI STANDAR KIPM DAN KHP	23,387,383,000	23,387,383,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	440807	SEKRETARIAT BPPMKHP	222,620,591,000	222,620,591,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	567694	STASIUN KIPM DAN KHP KENDARI	228,306,000	228,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	645691	STASIUN KIPM DAN KHP MAMUJU	132,060,000	132,060,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	649711	STASIUN KIPM DAN KHP SORONG	264,756,000	264,756,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	649589	STASIUN KIPM DAN KHP ACEH	1,094,470,000	1,094,470,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	645693	STASIUN KIPM DAN KHP BANDUNG	753,105,000	753,105,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	427649	STASIUN KIPM DAN KHP BATAM	683,227,000	683,227,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000	304,871,258,000			
26	649792	STASIUN KIPM DAN KHP BAUBAU	160,800,000	160,800,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	649622	STASIUN KIPM DAN KHP BENGKULU	574,268,000	574,268,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	649814	STASIUN KIPM DAN KHP BIMA	784,570,000	784,570,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	649732	STASIUN KIPM DAN KHP CIREBON	928,366,000	928,366,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	649678	STASIUN KIPM DAN KHP GORONTALO	493,789,000	493,789,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	649636	STASIUN KIPM DAN KHP JAMBI	195,176,000	195,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	649551	STASIUN KIPM DAN KHP KUPANG	380,500,000	380,500,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
33	649771	STASIUN KIPM DAN KHP LUWUK BANGGAI	171,170,000	171,170,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
34	649684	STASIUN KIPM DAN KHP MEDAN II	978,651,000	978,651,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
35	649688	STASIUN KIPM DAN KHP MERAK	996,270,000	996,270,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
36	649704	STASIUN KIPM DAN KHP MERAUKE	903,509,000	903,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
37	567432	STASIUN KIPM DAN KHP PADANG	748,892,000	748,892,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
38	649657	STASIUN KIPM DAN KHP PALANGKARAYA	858,250,000	858,250,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
39	567481	STASIUN KIPM DAN KHP PALEMBANG	390,073,000	390,073,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
40	649601	STASIUN KIPM DAN KHP PALU	397,648,000	397,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
41	649699	STASIUN KIPM DAN KHP PANGKAL PINANG	1,284,545,000	1,284,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
42	567453	STASIUN KIPM DAN KHP PEKANBARU	754,512,000	754,512,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
43	567538	STASIUN KIPM DAN KHP PONTIANAK	833,020,000	833,020,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
44	649800	STASIUN KIPM DAN KHP TAHUNA	508,760,000	508,760,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
45	649746	STASIUN KIPM DAN KHP TJ. BALAI ASAHAN	726,335,000	726,335,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
46	649767	STASIUN KIPM DAN KHP TERNATE	705,319,000	705,319,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
47	649725	STASIUN KIPM DAN KHP YOGYAKARTA	1,126,386,000	1,126,386,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (08) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
08	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT		50,518,334,000	50,518,334,000			
1	417154	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	50,518,334,000	50,518,334,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (05) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – 15 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		758,474,978,000	758,474,978,000			
1	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	20,299,569,000	20,299,569,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	16,681,384,000	16,681,384,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	20,840,752,000	20,840,752,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	325156	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	18,809,471,000	18,809,471,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	225135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	15,211,781,000	15,211,781,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	065135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	21,461,321,000	21,461,321,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	449520	SETDITJEN PENGAWASAN SDKP	549,904,060,000	549,904,060,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	16,852,683,000	16,852,683,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,740,296,000	18,740,296,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	215141	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	9,711,004,000	9,711,004,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	250263	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	7,617,665,000	7,617,665,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	031665	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	13,622,708,000	13,622,708,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	245160	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	12,492,975,000	12,492,975,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	170445	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	9,671,447,000	9,671,447,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	355105	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	6,557,862,000	6,557,862,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan – 42 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN		326,938,554,000	326,938,554,000			
1	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	990,954,000	990,954,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	403827	BBR BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,529,483,000	6,529,483,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	403835	BBR PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	4,985,346,000	4,985,346,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	403836	BBR SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,643,813,000	1,643,813,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	238755	BPPP AMBON	16,013,469,000	16,013,469,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	238762	BPPP BANYUWANGI	6,245,814,000	6,245,814,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239260	BPPP BITUNG	12,257,656,000	12,257,656,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	238741	BPPP MEDAN	4,518,648,000	4,518,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239188	BPPP TEGAL	39,950,140,000	39,950,140,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	653526	BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI	5,196,446,000	5,196,446,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	2,868,988,000	2,868,988,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	3,231,545,000	3,231,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2,104,748,000	2,104,748,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	403828	BRP BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,817,145,000	6,817,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	403829	BRP BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	7,759,499,000	7,759,499,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	1,093,050,000	1,093,050,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	403823	BRP PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,931,859,000	6,931,859,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	1,466,192,000	1,466,192,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	1,219,765,000	1,219,765,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	928,933,000	928,933,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	1,701,958,000	1,701,958,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
12		BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	326,938,554,000	326,938,554,000			
22	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	1,730,900,000	1,730,900,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	57,281,778,000	57,281,778,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,633,984,000	2,633,984,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	3,306,385,000	3,306,385,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
26	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	12,655,559,000	12,655,559,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	2,047,982,000	2,047,982,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	19,357,989,000	19,357,989,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	1,823,939,000	1,823,939,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	2,467,483,000	2,467,483,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	18,089,136,000	18,089,136,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	5,759,647,000	5,759,647,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
33	403821	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,980,873,000	7,980,873,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
34	652009	SUPM KOTA AGUNG LAMPUNG	4,715,445,000	4,715,445,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
35	427551	SUPM LADONG	2,407,153,000	2,407,153,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
36	427573	SUPM PARIAMAN	4,821,203,000	4,821,203,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
37	427582	SUPM PONTIANAK	1,668,251,000	1,668,251,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
38	427630	SUPM SORONG	1,336,284,000	1,336,284,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
39	237373	SUPM TEGAL	4,040,473,000	4,040,473,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
40	427618	SUPM WAEHERU	2,018,843,000	2,018,843,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
41	626402	SEKRETARIAT BADAN RISET PPSDM KP	34,580,706,000	34,580,706,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
42	389090	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	1,759,090,000	1,759,090,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (03) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – 24 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
03	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP		6,234,837,443,000	6,234,837,443,000			
1	239150	BBPI SEMARANG	4,266,256,000	4,266,256,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622461	PPN AMBON	2,888,215,000	2,888,215,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427692	PPN BRONDONG	5,550,267,000	5,550,267,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	239146	PPN KARANGANTU	4,975,865,000	4,975,865,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	622482	PPN KEJAWANAN	76,447,767,000	76,447,767,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	310719	PPN KWANDANG	3,808,313,000	3,808,313,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239171	PPN PEKALONGAN	2,624,978,000	2,624,978,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	560393	PPN PELABUHAN RATU	4,966,852,000	4,966,852,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239991	PPN PEMANGKAT	2,169,663,000	2,169,663,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	633693	PPN PENGAMBENGAN	277,833,054,000	277,833,054,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	427670	PPN PRIGI	2,946,640,000	2,946,640,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	560401	PPN SIBOLGA	3,526,343,000	3,526,343,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	239214	PPN SUNGAILIAT	3,715,198,000	3,715,198,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	239221	PPN TANJUNG PANDAN	1,437,176,000	1,437,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	427661	PPN TERNATE	4,335,453,000	4,335,453,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	622475	PPN TUAL	2,121,021,000	2,121,021,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	239235	PPP TELUK BATANG	2,044,222,000	2,044,222,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	427655	PPS BELAWAN	8,432,114,000	8,432,114,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	633707	PPS BITUNG	10,659,664,000	10,659,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	531488	PPS BUNGUS	1,676,910,000	1,676,910,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	518117	PPS CILACAP	10,461,664,000	10,461,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	537695	PPS KENDARI	43,633,886,000	43,633,886,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	537611	PPS NIZAM ZACHMAN	29,534,068,000	29,534,068,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	238720	SETDITJEN PERIKANAN TANGKAP	5,724,781,854,000	5,724,781,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (02) Inspektorat Jenderal – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
02	INSPEKTORAT JENDERAL		15,127,743,000	15,127,914,000			
1	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	15,127,743,000	15,127,914,000	(171,000)	99.9989%	Kurang Terumumkan

 (06) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – 2 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN		158,069,244,000	158,066,570,000			
1	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN	7,347,589,000	7,347,589,000	0	100.0000%	Sudah Sesuai
2	622131	SETDITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	150,721,655,000	150,718,981,000	2,674,000	100.0018%	Lebih Terumumkan

 (07) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan – 5 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN		1,170,166,198,000	1,169,007,198,000			
1	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	6,455,753,000	6,455,753,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	3,199,403,000	3,199,403,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,736,010,000	2,736,010,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	477456	Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	2,970,613,000	2,970,613,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	622145	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	1,154,804,419,000	1,153,645,419,000	1,159,000,000	100.10%	Lebih Terumumkan

 (04) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya – 16 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
04	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA		897,634,697,000	917,960,850,000			
1	239192	BBPB AIR PAYAU JEPARA	33,776,312,000	33,776,312,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	238734	BBPB AIR TAWAR SUKABUMI	26,301,351,000	26,301,351,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427706	BBPB LAUT LAMPUNG	17,815,644,000	17,815,644,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	445393	BLU PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	126,396,102,000	126,396,102,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	567800	BPKIL SERANG	3,287,862,000	3,287,862,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	567350	BPB AIR PAYAU SITUBONDO	48,941,145,000	48,941,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	567680	BPB AIR PAYAU TAKALAR	15,771,406,000	15,771,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	567385	BPB AIR PAYAU UJUNG BATEE	10,567,720,000	10,567,720,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567584	BPB AIR TAWAR MANDIANGIN	16,416,369,000	16,416,369,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	237657	BPB AIR TAWAR SUNGAI GELAM	19,225,478,000	19,225,478,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	538911	BPB AIR TAWAR TATELU	11,923,306,000	11,923,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	567720	BPB LAUT AMBON	14,325,630,000	14,325,630,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	567474	BPB LAUT BATAM	9,292,277,000	9,292,277,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	567762	BPB LAUT LOMBOK	13,441,592,000	13,441,592,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	445394	BPI UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	6,052,854,000	6,052,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDI DAYA	524,099,649,000	544,425,802,000	(20,326,153,000)	96.27%	Kurang Terumumkan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo